

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ajub, M. Fadly 2016. *Analisis Perbandingan Target dan Realisasi serta Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2011-2014*.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku 1. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Diana, Putri. 2017. *Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Kontribusinya terhadap PAD Kota Solok*.

Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan Pariba.

Halim, Abdul., Theresia Damayanti., 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPPSTIMYKPN, Yogyakarta.

Helfial Restu Kurniawan, 2017. *Pemungutan Pajak Air Tanah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mitang, Petrus A. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap PAD Kota Kupang tahun 2010-2014*

Peraturan Daerah Kota Padang Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Padang Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Padang Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Republik Indonesia, *Undang-*

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Siahaan, MARIHOT P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

